

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : KPW PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRISNO NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 260920

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 9.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
5. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.525.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 205.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000



3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON M6L Tahun 2022, HASIL  
SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	412.750.180
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.132.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	17.175.250.180
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.175.250.180

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.